

Digitalisasi Peta Administrasi Padukuhan Jambu dengan Teknologi GIS

Billie Ariyanta Hartono¹, Amanda Vanessa Christiawan², Erick G Nathanael Manullang³, Evelyn Hotadi⁴, Kristya Amalia Perwita⁵, Maureena Uly Pasaribu⁶, Monica Yosephina Kawak⁷, Nathanael Charles Roessli⁸, Raja Juan Ewaldo Karmomjnan⁹, Teodorus Bagas Pramudita¹⁰, Didit Gunawan Prasetyo Jati¹¹

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No.44, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: 211125947@students.uajy.ac.id

Received 18 March 2025; Revised 2 April 2025; Accepted for Publication 7 April 2025; Published 30 July 2025

Abstract — This article discusses the process of creating an administrative map for Padukuhan Jambu, Hargosari Village, Tanjungsari District, Gunungkidul Regency, to update the last map created in 1997. Utilizing Geographic Information System (GIS) technology, this updated map aims to provide more accurate data on administrative boundaries, neighborhood divisions (RT), land use, public facilities, and demographic information, including house numbers and household head names. The methods applied include field surveys, interviews with local community leaders, and data processing using mapping software. The final map is expected to support spatial planning, regional management, and facilitate household identification and data collection. The community response to the socialization of this mapping project has been overwhelmingly positive, as they recognized the benefits of having more precise and structured information. This administrative map is anticipated to be a valuable tool for local government, academics, and the community in fostering more efficient administration and sustainable development.

Keywords — Administrative map, Jambu Hamlet, Area management

Abstrak—Artikel ini membahas proses pembuatan peta administrasi Padukuhan Jambu, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang bertujuan memperbarui peta terakhir yang dibuat pada tahun 1997. Dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS), peta ini menyajikan data yang lebih akurat terkait batas administratif, pembagian RT, tata guna lahan, fasilitas umum, serta informasi demografi seperti nomor rumah dan nama kepala keluarga. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta pengolahan data menggunakan perangkat lunak pemetaan. Peta yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan wilayah, serta mempermudah identifikasi dan pendataan rumah tangga. Sosialisasi hasil pemetaan menunjukkan respons positif dari masyarakat yang mengakui manfaat peta ini dalam menyediakan informasi yang lebih jelas dan terstruktur. Peta administrasi ini diharapkan menjadi alat yang bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung pembangunan yang lebih terarah.

Kata Kunci—Peta administrasi, Padukuhan Jambu, Pengelolaan wilayah.

I. PENDAHULUAN

Padukuhan Jambu, yang terletak di Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Wilayah ini mencakup lahan pertanian, perkebunan, peternakan, serta fasilitas umum seperti balai padukuhan, masjid, pasar desa, GOR, dan lapangan sepak

bola. Sebagian besar masyarakat Padukuhan Jambu mengandalkan komoditas pertanian seperti padi, jagung, kacang, dan ubi kayu, serta peternakan lembu, kambing, dan ayam sebagai mata pencaharian utama.

Peta wilayah Padukuhan Jambu terakhir diperbarui pada tahun 1997 menggunakan teknik manual. Namun, peta ini tidak berskala dan belum mencerminkan perubahan yang terjadi di lapangan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperbarui peta dengan teknologi pemetaan digital yang lebih akurat dan terperinci. Peta administrasi dan potensi wilayah ini berperan penting dalam mendukung pembangunan desa serta menjadi implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, serta Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 [1].

Pembaruan peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu menggunakan teknologi *Geographic Information System* (GIS) untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. Peta yang dihasilkan tidak hanya memperbarui data wilayah yang sudah ada tetapi juga menyajikan informasi lebih lengkap mengenai pembagian wilayah administrasi, tata guna lahan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Salah satu pembaruan signifikan adalah penambahan nomor rumah dan nama kepala keluarga, yang mempermudah identifikasi rumah tangga serta administrasi wilayah [2], [3].

Pembaruan peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu menggunakan teknologi *Geographic Information System* (GIS) untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. Peta yang dihasilkan tidak hanya memperbarui data wilayah yang sudah ada tetapi juga menyajikan informasi lebih lengkap mengenai pembagian wilayah administrasi, tata guna lahan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Salah satu pembaruan signifikan adalah penambahan nomor rumah dan nama kepala keluarga, yang mempermudah identifikasi rumah tangga serta administrasi wilayah.

Pembuatan peta ini bertujuan untuk menyajikan gambaran jelas mengenai pembagian administrasi dan tata guna lahan di Padukuhan Jambu. Dengan teknik pemetaan digital, peta ini diharapkan mampu memvisualisasikan informasi geografis secara lebih akurat, mencakup pembagian RT, lokasi pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur. Selain itu, peta ini mendukung identifikasi potensi wilayah, seperti sumber daya alam dan lokasi strategis, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peta administrasi wilayah sangat penting untuk menyajikan informasi mengenai lahan yang telah dibangun di area Padukuhan [4]. Peta menyajikan informasi tentang lokasi dengan akurat sesuai dengan koordinat geografis yang diperoleh dari citra satelit. Setiap

tingkat administrasi perlu memiliki peta untuk mendukung dan membatasi aktivitasnya. Peta provinsi, meskipun berguna, kurang rinci untuk merencanakan pembangunan di tingkat desa yang memerlukan peta dengan skala lebih detail [5].

Peta yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Bagi masyarakat, peta ini mempermudah identifikasi masalah di wilayah mereka, seperti kekurangan fasilitas atau ketidaksesuaian tata guna lahan. Informasi yang jelas mengenai batas wilayah juga membantu dalam kebutuhan sosial dan ekonomi. Dengan adanya nomor rumah dan nama kepala keluarga pada peta, pendataan rumah tangga menjadi lebih akurat, yang akan mendukung akses terhadap layanan publik seperti bantuan sosial dan program pemerintah lainnya [6].

Bagi pemerintah, peta administrasi ini menjadi alat yang berguna untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai batas wilayah, jumlah penduduk, serta lokasi fasilitas umum. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, distribusi layanan publik, serta pengambilan keputusan strategis terkait kebutuhan wilayah. Bagi perguruan tinggi, pembuatan peta ini mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Peta ini juga menjadi referensi penelitian di bidang tata ruang, perencanaan desa, dan pengelolaan wilayah. Selain itu, keterlibatan akademisi dalam proyek ini memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu diharapkan menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan wilayah, mendukung perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

II. METODE PENGABDIAN

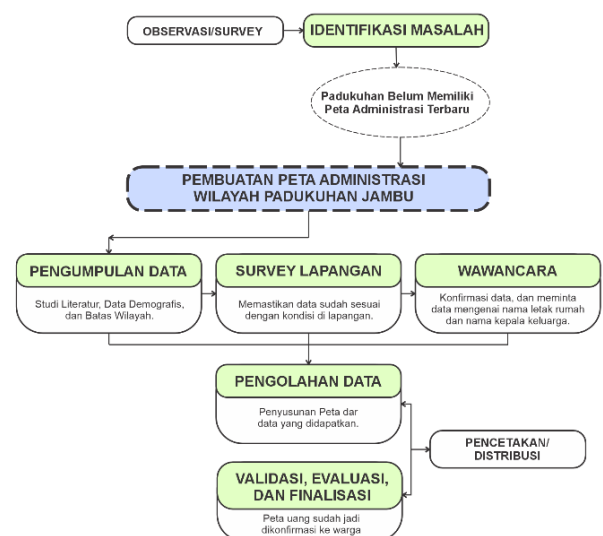
Metode pengabdian yang digunakan berdasarkan pada peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 tahun 2016 yang melibatkan tahapan survei, pengumpulan data, pembuatan peta, konsultasi hasil, pencetakan peta, dan serah terima peta [7]. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian ini kemudian dilakukan melalui beberapa proses seperti pada Gambar 1 sebagai Kerangka Berpikir selama proses pengabdian bersama.

A. Identifikasi Masalah

Proses awal dalam pelaksanaan program kerja individu ini Tahap awal dalam pelaksanaan program ini dimulai dengan identifikasi permasalahan yang ada di Padukuhan Jambu. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui bahwa wilayah ini masih menggunakan peta administrasi yang dibuat secara manual pada tahun 1997. Peta tersebut tidak memiliki skala yang jelas dan belum cukup merepresentasikan kondisi terkini, termasuk perubahan batas wilayah, pertumbuhan pemukiman, serta perkembangan infrastruktur dan fasilitas umum.

Selain itu, dalam rapat bersama Dukuh, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang diadakan pada tanggal 17 November 2024, ditemukan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan batas administrasi wilayah yang akurat. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan dalam kepemilikan lahan, pendataan penduduk yang tidak akurat, serta keterbatasan informasi mengenai potensi wilayah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ketiadaan peta administrasi yang terbaru juga berdampak pada perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur karena kurangnya data yang terorganisir dengan baik. Selain itu, beberapa program bantuan sosial dan pengembangan wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal karena tidak adanya referensi peta yang valid.

Berdasarkan permasalahan ini, disepakati untuk melakukan pembaruan peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu menggunakan teknologi pemetaan digital berbasis *Geographic Information System* (GIS). Teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan peta yang lebih akurat, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya [8], [9]. Oleh karena itu, sinkronisasi informasi antara Peta wilayah dan data administratif kemudian diajukan menjadi salah satu alat sebagai pendekatan awal terhadap masalah awal di wilayah pedukuhan Jambu.



Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir

B. Pengumpulan Data

Setelah mengidentifikasi permasalahan di lokasi pengabdian dan menetapkan program kerja "Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu," langkah selanjutnya adalah pengumpulan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Tahapan pertama yang dilakukan adalah studi literatur terkait konteks geografis dan administratif Padukuhan Jambu, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Informasi

yang dikumpulkan mencakup data demografis, kondisi topografi, dan batas-batas wilayah. Data tersebut diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu yang terakhir diperbarui pada tahun 1997 (Gambar 2).



Gambar 2. Pengumpulan Data bersama Tokoh Masyarakat

C. Survei Lapangan

Survei lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkini mengenai wilayah Padukuhan Jambu dan memastikan kesesuaian antara informasi geografis serta administratif yang diperoleh dari sumber daring dengan kondisi di lapangan. Proses ini melibatkan verifikasi batas wilayah menggunakan perangkat GPS untuk mencatat koordinat secara tepat. Selain itu, pemetaan infrastruktur dilakukan dengan mencatat fasilitas umum seperti balai desa, tempat ibadah, sekolah, dan pos ronda, serta jalan utama dan jalan lingkungan. Elemen fisik lainnya, seperti sungai, area hijau, dan kondisi topografi, juga didokumentasikan untuk melengkapi data geografis yang diperlukan. Dokumentasi visual berupa foto dan video turut diambil untuk mendukung pembuatan peta administrasi secara lebih menyeluruh. Melalui survei ini, keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat divalidasi, sehingga peta yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi aktual wilayah dengan tepat.

D. Wawancara

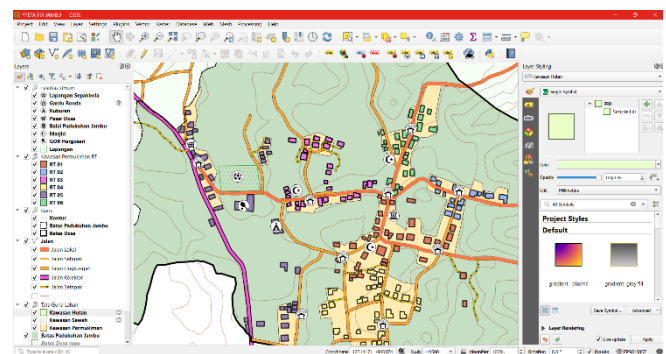
Wawancara dilakukan dengan perangkat desa, kepala dusun, RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai batas wilayah, perubahan yang telah terjadi, serta kebutuhan masyarakat terkait peta administrasi (Gambar 3). Selain itu, dalam wawancara ini juga diminta data mengenai nama-nama kepala keluarga di setiap rumah pada masing-masing RT, guna melengkapi informasi demografis yang akan disertakan dalam peta. Tujuan dari proses ini adalah untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan memastikan bahwa peta administrasi tidak hanya mencakup informasi geografis, tetapi juga menyertakan data pendukung yang relevan bagi masyarakat.



Gambar 3. Wawancara untuk mendapatkan informasi

E. Pengolahan data/Penyusunan Peta

Setelah data yang diperoleh dari survei lapangan dan wawancara terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh, termasuk koordinat geografis, informasi batas wilayah, kondisi topografi, dan infrastruktur, dianalisis dan dipadukan dengan data historis dari peta yang ada sejak tahun 1997. Selanjutnya, peta tersebut didigitalisasi menggunakan perangkat lunak pemetaan QGIS, untuk menghasilkan peta administrasi yang lebih rinci dan mencerminkan kondisi aktual wilayah (Gambar 4).



Gambar 4. Penyusunan Peta

F. Validasi, Evaluasi, dan Finalisasi



Gambar 5. Validasi Akhir

Peta yang telah disusun kemudian divalidasi melalui rapat bersama Kepala Dukuh, RT, RW, dan tokoh

masyarakat. Proses validasi ini meliputi pengecekan batas wilayah, infrastruktur, kondisi topografi, serta daftar nama kepala keluarga di masing-masing RT untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Evaluasi dilakukan berdasarkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat, dan jika ditemukan kesalahan atau kekurangan data, revisi akan dilakukan segera. Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait, peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu difinalisasi dan diserahkan kepada pihak padukuhan sebagai dokumen resmi (Gambar 5). Selain itu, peta beserta data pendukung lainnya akan disosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai keperluan administratif dan perencanaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah peta administrasi terbaru dari Padukuhan Jambu yang diperbarui menggunakan teknologi GIS. Peta ini mencerminkan kondisi terkini wilayah, batas administratif, pembagian RT, tata guna lahan, serta lokasi fasilitas umum.

A. Hasil Sosialisasi Program Kerja

Sosialisasi program kerja pada sesi *Live-in* yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2025, mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat Padukuhan Jambu (Gambar 6). Hal ini tercermin dari antusiasme yang tinggi dalam diskusi dan penerimaan terhadap program tersebut. Salah satu alasan utama dari antusiasme tersebut adalah kenyataan bahwa sejak tahun 1997, Padukuhan Jambu tidak memiliki peta administrasi wilayah yang terbaru. Meskipun kebutuhan akan pembaruan peta administrasi wilayah ini telah menjadi topik yang sering dibahas dalam setiap rapat padukuhan, namun belum ada pihak yang mampu mengimplementasikan pembuatan peta tersebut.



Gambar 6. Sosialisasi Program pada Tokoh Masyarakat

Kondisi ini menciptakan kesadaran akan pentingnya memiliki peta administrasi wilayah yang akurat dan terkini. Peta ini tidak hanya akan menjadi alat bantu dalam mengelola data administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah pengelolaan wilayah, baik

dalam aspek pemerintahan maupun pembangunan. Dengan adanya peta administrasi yang valid, masyarakat dan perangkat desa dapat lebih efektif dalam mendokumentasikan dan memonitor perkembangan wilayah. Selain itu, peta ini diharapkan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih baik, baik pada tingkat desa maupun dalam skala yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang lebih terarah dan terukur [10]–[12].

B. Perencanaan Program Kerja

Perencanaan program kerja "Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu" telah menghasilkan beberapa capaian awal yang signifikan, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan di Padukuhan Jambu. Salah satu capaian utama adalah keberhasilan pengumpulan data dasar wilayah, yang dilakukan melalui keterlibatan langsung perangkat padukuhan, seperti Kepala Dukuh, Bapak RW, dan Ketua RT. Proses pengumpulan data ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan batas-batas wilayah administratif, tetapi juga pendokumentasian lokasi sarana dan prasarana yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti Balai Padukuhan, masjid/musholla, fasilitas olahraga, dan lainnya [13].

Selain itu, informasi demografi masyarakat Padukuhan Jambu juga berhasil dikumpulkan, yang mencakup data jumlah penduduk, distribusi rumah tangga, serta identitas kepala keluarga. Data ini menjadi komponen penting dalam membangun peta administrasi yang tidak hanya mencerminkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur sosial dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peta tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih luas terutama dalam hal perencanaan dan mitigasi bencana [15].

Hasil dari perencanaan program kerja ini menunjukkan respons yang sangat positif dari warga setempat, yang merasa kebutuhan mereka akan peta administrasi yang akurat dan terkini mulai teratasi. Warga mengapresiasi adanya peta yang akan mempermudah pendataan wilayah dan mendukung berbagai kebutuhan administratif. Proses evaluasi yang melibatkan masyarakat juga menjadi bagian integral dari perencanaan ini, guna memastikan bahwa peta yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar akurasi geografis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan wilayah yang ada. Evaluasi ini mencakup umpan balik dari masyarakat mengenai elemen-elemen yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, sehingga peta administrasi yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah di Padukuhan Jambu.

C. Penyerahan dan Pemasangan Peta

Rangkaian kegiatan akhir dari Program Kerja Individu "Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu" dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025, bertepatan dengan acara perpisahan dan penutupan pengabdian

bersama di Padukuhan Jambu. Acara tersebut diselenggarakan pada pukul 19.30 WIB di Balai Padukuhan Jambu, dengan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Dukuh, perangkat RT dan RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Kelompok Wanita Tani, serta warga setempat. Pada acara ini, peta administrasi wilayah yang telah disusun diserahkan secara simbolis dalam bentuk cetakan fisik kertas ivory ukuran A0 (260 g), meskipun belum dibingkai (Gambar 7).



Gambar 7. Penyerahan Peta Kepada Ketua RW 05

Dalam penyerahan peta, dilakukan penjelasan rinci mengenai cara membaca dan menggunakan peta tersebut. Salah satu aspek penting yang dijelaskan adalah legenda yang terdapat pada peta, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang simbol-simbol yang digunakan, serta informasi-informasi lain yang terkandung dalam peta tersebut. Selain itu, kesempatan diberikan kepada seluruh perangkat padukuhan, Karang Taruna, dan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan masukan dan evaluasi terkait hasil peta. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peta yang dihasilkan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Diharapkan, peta ini akan bermanfaat dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, serta dapat digunakan oleh masyarakat dan pihak luar yang memerlukan.



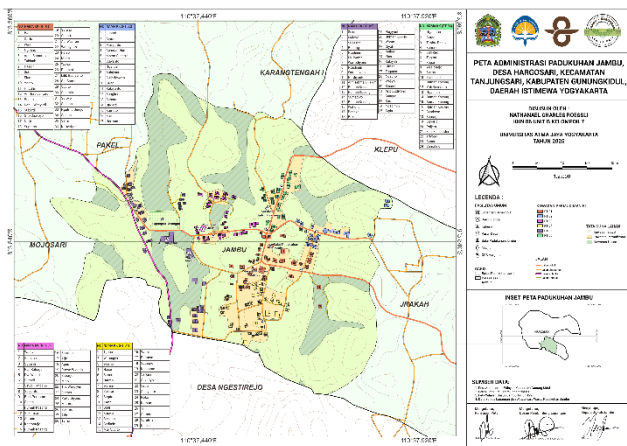
Gambar 8. Penyerahan Kepada Kepala Dukuh Jambu

Setelah peta dinyatakan final dan tidak ada lagi kekeliruan yang perlu diperbaiki, peta tersebut kemudian dibingkai dengan bingkai kayu dan dilapisi menggunakan plastik mika untuk memastikan daya tahan dan kualitasnya. Peta yang telah dibingkai tersebut dipajang di Balai Padukuhan Jambu sebagai simbol resmi dari keberhasilan program ini. Selain itu, peta juga dicetak dalam ukuran A3 pada kertas *ivory* untuk dipasang di setiap gardu ronda yang terdapat di Padukuhan Jambu, yang berjumlah delapan titik (Gambar 8). Dengan langkah ini, peta administrasi wilayah Padukuhan Jambu diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas dan praktis, serta menjadi referensi penting dalam pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

D. Pembahasan

Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu yang telah diserahkan mencakup berbagai informasi penting yang diperlukan untuk pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan. Peta ini menyajikan data mengenai batas wilayah Padukuhan Jambu secara keseluruhan, termasuk batas-batas administrasi tingkat RT dan RW yang mempermudah identifikasi unit-unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa. Selain itu, peta ini menggambarkan tata guna lahan yang ada di wilayah tersebut, seperti lahan pertanian, lahan pemukiman, dan lahan fasilitas umum, yang mencakup lokasi-lokasi penting seperti masjid/musholla, gedung olahraga (GOR), lapangan sepak bola, Balai Padukuhan, kuburan, pasar desa, serta lokasi gardu ronda.

yang tersebar di beberapa titik strategis.



Gambar 9. Hasil Akhir Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu

Lebih lanjut, peta ini juga menyajikan jaringan jalan yang ada, yang terdiri dari berbagai jenis jalan, yaitu jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jalan setapak. Penandaan jenis jalan ini penting untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas di wilayah Padukuhan Jambu, serta mendukung upaya peningkatan infrastruktur. Salah satu fitur penting lainnya dari peta ini adalah pencantuman lokasi-lokasi setiap rumah dengan menyertakan nama Kepala Keluarga (KK) di masing-masing rumah tangga. Ini memungkinkan pendataan yang lebih akurat terkait demografi dan distribusi penduduk di wilayah tersebut (Gambar 9).

Peta administrasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dan panduan yang komprehensif bagi perangkat padukuhan dalam merencanakan pembangunan dan mengelola wilayah dengan lebih efisien. Peta ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak luar yang berkepentingan, seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, atau organisasi lain, sebagai referensi dalam perencanaan program atau intervensi pembangunan yang berkaitan dengan wilayah Padukuhan Jambu. Selain itu, peta ini juga memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai kepentingan administratif, seperti pendataan kependudukan, perencanaan program sosial, serta pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, peta administrasi ini tidak hanya memberikan informasi geografis yang akurat, tetapi juga berperan penting untuk mendukung kebijakan publik di wilayah terkait [8], [15].

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Padukuhan Jambu telah dilaksanakan dengan sukses, menghasilkan peta administrasi yang akurat dan terperinci. Peta tersebut mencakup informasi mengenai batas wilayah, jaringan jalan, fasilitas umum, serta data demografis seperti daftar nama kepala keluarga di setiap RT. Proses pelaksanaan program ini dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui survei lapangan, wawancara, serta pengolahan data yang

cermat. Tahapan selanjutnya adalah validasi dan finalisasi peta, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan administratif dan perencanaan wilayah. Keberhasilan program ini juga didukung oleh kolaborasi yang kuat antara tim Pengabdian bersama mahasiswa UAJY, perangkat desa seperti Kepala Dukuh, para ketua RT, ketua RW, Bapak Didit sebagai dosen pembimbing lapangan, serta masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UAJY, Bapak Ir. Didit Gunawan Prasetyo Jati, S.Kom, M.Sc., sebagai dosen pembimbing lapangan, keluarga tercinta, teman-teman kelompok 7, Bapak Wasno selaku Kepala Padukuhan Jambu, Bapak RW dan seluruh Bapak RT, serta seluruh warga Padukuhan Jambu yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KEMENDAGRI, *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA*. KEMENDAGRI, 2016.
- [2] R. Faisal, C. Mutiawati, F. M. Suryani, S. M. Saleh, and L. C. Taufiq, "Pembuatan Peta Administrasi Gampong Luthu Lamweu," *Pesar. J. Pengabd. Sains dan Rekayasa*, vol. 02, no. 01, pp. 1–9, Feb. 2024, doi: 10.24815/PESARE.V2I1.37359.
- [3] F. Husain *et al.*, "Pengadaan Peta Administrasi Desa Patallassang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 2023.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/30230> (accessed Mar. 19, 2025).
- [4] E. Sutriyono, S. Nalendra, E. D. Hastuti, and ..., "Peran Open Street Map (OSM) Terhadap Peta Administrasi Desa Tekana, Kabupaten Oku Selatan," ... *Nasional AVoER IX*, 2017.
https://www.researchgate.net/profile/Stevanus-Nalendra/publication/322619736_PERAN_OPEN_STREET_MAP_OSM_TERHADAP_PETA_ADMINISTRASI_DESA_TEKANA_KABUPATEN_OKU_SELATAN/links/5a632bbe0f7e9b6b8fd75f84/PERAN-OPEN-STREET-MAP-OSM-TERHADAP-PETA-ADMINISTRASI-DESA-TE (accessed Mar. 19, 2025).
- [5] Hery Widijanto, H. Weildan, P. M. H. Tanjung, B. A. Saputra, and R. D. Pramudyo, "Pembuatan Peta Administrasi dan Peta Tata Guna Lahan Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar," *J. Karya Pengabd.*, vol. 6, p. 2, 2024, doi: 10.29303/jkp.v6i2.177.
- [6] L. D. Rohmadiani, M. Shofwan, A. A. Sagung Alit Widyastuty, A. B. Tribhuwaneswari, S. N. Rukmana, and S. Suning, "Pembuatan Peta Administrasi Sebagai Pendukung Pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 155–160, Apr. 2022, doi: 10.31004/abdira.v2i2.113.
- [7] Badan Informasi Geospasial, "Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial," 3, 2016. [Online]. Available: <https://peraturanpedia.id/peraturan-kepala-badan-informasi-geospasial-nomor-3-tahun-2016/>.
- [8] Nurwadjedi, "Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional," *Bul. Tata Ruang dan Pertanah*, pp. 149–169, 2016.
- [9] P. Master Plan di Objek Wisata Watu Payung sebagai Bentuk Gerakan *et al.*, "Perancangan Master Plan di Objek Wisata Watu Payung sebagai Bentuk Gerakan Desa Sadar Lingkungan dan Fasilitas Umum di Desa Girisuko," *J. Atma Inovasia*, vol. 2, no. 3, pp. 287–293, May 2022, doi: 10.24002/JAI.V2I3.4517.

- [10] S. Apriani, P. Lestari, F. Susanti, A. Kurniawan, and R. Ridha, "Penyusunan Peta Administrasi dan Fasilitas Berbasis Masyarakat di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur," *SINERGI J. Pengabd.*, vol. 2, no. 1, Jan. 2020, doi: 10.31764/SJPU.V2I1.1715.
- [11] H. Adeswastoto, M. Islah, and R. Saputra, "Penyusunan Peta Desa Dalam Rangka Pengembangan Desa di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok," *JES-TM Soc. Community Serv.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–5, Aug. 2022.
- [12] I. Permatasari, B. P. Hakim, R. A. Anugraha, and T. Sjafrizal, "Integrasi Geographic Information System dalam Pengelolaan Unit Struktur Kelurahan," *Int. J. Community Serv. Learn.*, vol. 8, no. 4, pp. 449–454, Nov. 2024, doi: 10.23887/IJCSL.V8I4.82876.
- [13] P. Peta Administrasi Sebagai Pendukung Pembangunan Daerah Desa Bligo *et al.*, "Pembuatan Peta Administrasi Sebagai Pendukung Pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 155–160, Apr. 2022, doi: 10.31004/ABDIRA.V2I2.113.
- [14] P. Masyarakat, P. Penataan, P. Kumuh, D. Kampung, and P. Baru, "Pendampingan Masyarakat dalam Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Pedak Baru, Bantul," *J. Atma Inovasia*, vol. 3, no. 6, pp. 505–512, Nov. 2023, doi: 10.24002/JAI.V3I6.8139.
- [15] N. R. Syamsiar, R. Munajal, and A. G. Saputra, "Kegiatan Penyusunan Peta Administrasi Wilayah di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene," *J. Pengabd. Masy. Tek.*, vol. 7, no. Oktober, p. 1, 2024.



Kristya Amalia Perwita, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Maureena Uly Pasaribu, Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Monica Yosephina Kawak, Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Nathanael Charles Roessli, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PENULIS



Billie Ariyanta Hartono, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Raja Juan Ewaldo Karmomjanan, prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Amanda Vanessa Christiawan, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Teodorus Bagas Pramudita, prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Erick G Nathanael Manullang, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Didit Gunawan Prasetyo Jati, prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Evelyn Hotadi, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.